

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi perhatian global setelah *Millennium Development Goals (MDGs)*, tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Konsep SDGs pada hakikatnya merupakan perkembangan dari MDGs. Menurut Ferawati(2018), Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa merusak atau membatasi potensi generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap negara di dunia telah berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030, sekaligus memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan kehidupan masyarakat (Islamiyah *et al.* 2021) yang tertuang dalam 17 SDGs.

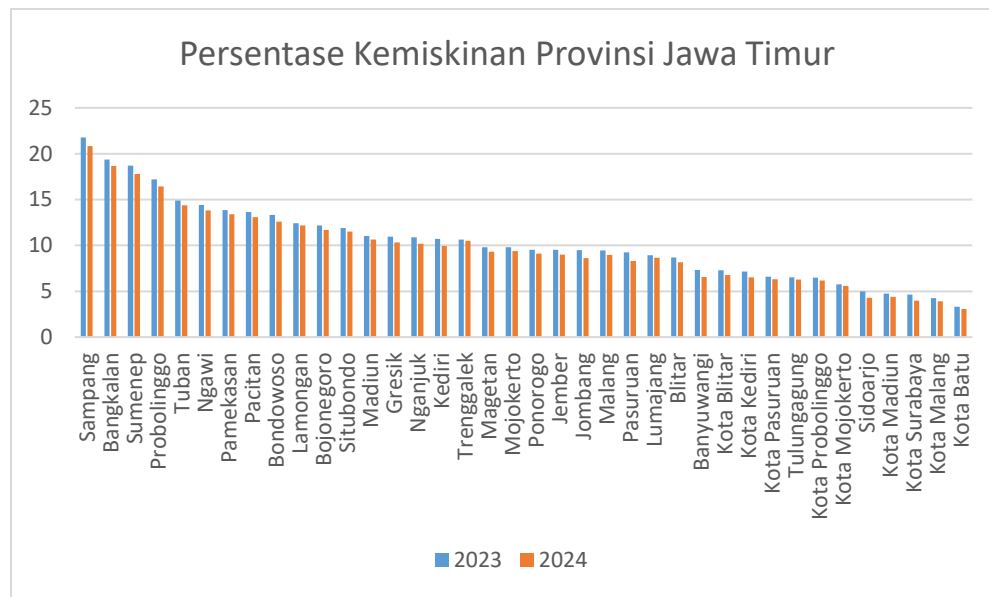
Guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan nasional hingga tingkat desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, yang mulai berfokus pada SDGs Desa (Boekoesoe and Maksum 2022). Kementerian Desa (2021) menyatakan bahwa SDGs Desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian SDGs nasional melalui aspek kedaerahan dan kewarganegaraan, di mana 91% wilayah Indonesia merupakan daerah pedesaan (Handoyo *et al.* 2023).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (*SDGs Desa*) merupakan instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Dengan implementasi

yang efektif serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (TPB Desa) diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa serta berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) secara nasional. Salah satu, sasaran TPB yaitu pengentasan kemiskinan dengan mengakhiri kemiskinan ekstrem di seluruh dunia pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah dari jumlah penduduk (laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari berbagai kelompok usia) yang hidup dalam kemiskinan, serta menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan (Azizah ,2023).

Kemiskinan merupakan suatu kondisi rendahnya taraf hidup individu atau kelompok, mengalami kekurangan dalam berbagai aspek dibandingkan dengan standar hidup minimum yang berlaku. Kondisi ini berdampak pada kesehatan, moralitas, serta martabat individu atau kelompok yang tergolong kurang mampu. Menurut Sinurat (2023) menyatakan bahwa kemiskinan terjadi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan serius, terutama dalam konteks meningkatnya kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia berkomitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut sejalan dengan deklarasi SDGs. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia juga berupaya mewujudkan target yang telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Ishartono & Raharjo, 2020). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, antara lain melalui program

pengentasan kemiskinan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun hingga saat ini kemiskinan masih tetap ada (Telaumbanua & Ndraha, 2023).

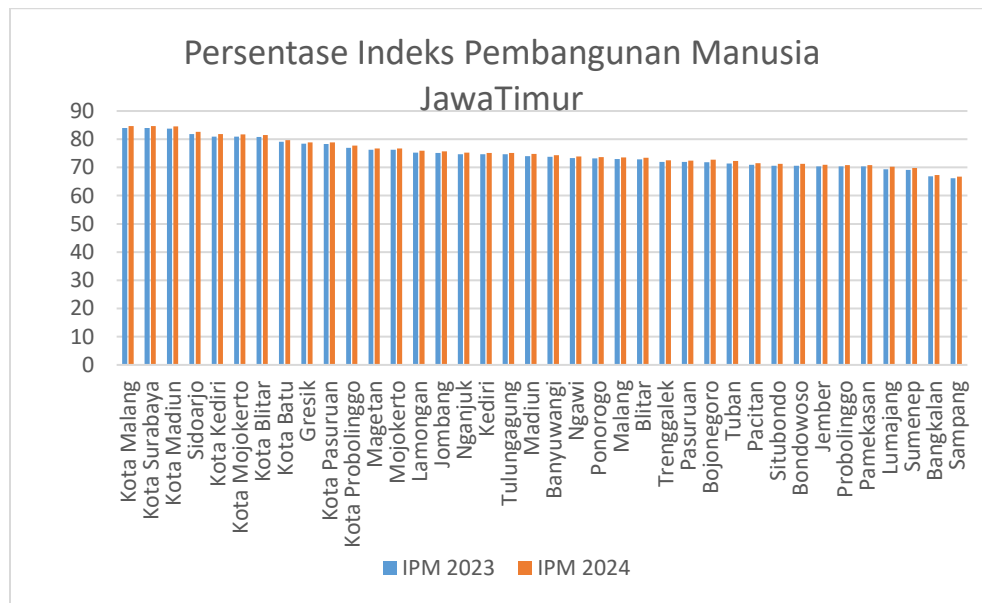


Gambar 1. 1 Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2023 – 2024

Sumber: (Badan Pusat Statistik 2025)

Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan angka kemiskinan sebesar 0,72% dari tahun 2023 ke 2024. Ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, meskipun masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur tahun 2024 (9,56%). Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, Nganjuk berada di peringkat ke-15 tertinggi dalam angka kemiskinan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Nganjuk masih relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang sudah berada di bawah 10%. Serta kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur pencapaian

pembangunan manusia dari tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pengetahuan, pendidikan serta pendapatan. IPM menjadi tolok ukur sejauh mana penduduk di suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan (Yulianti & Qomariah 2025).

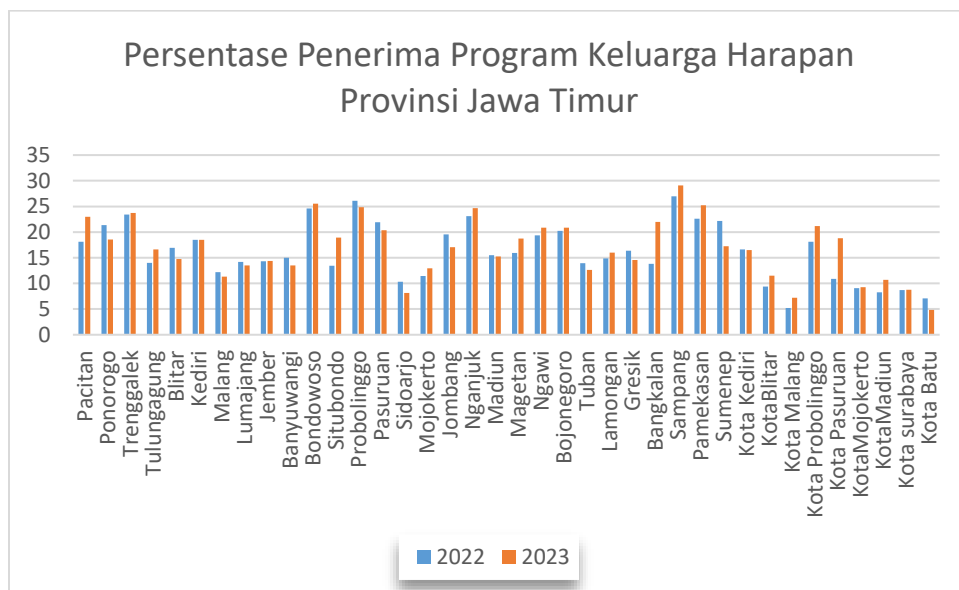


Gambar 1. 2 Persentase Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur 2023 – 2024

Sumber: (Badan Pusat Statistik 2025)

Gambar 1.2. Persentase Indeks Pembangunan manusia menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan dari 74,70 pada tahun 2023 menjadi 75,24 pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 0,54 poin ini menandakan bahwa secara umum terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik 2025, capaian Indeks Pembangunan manusia Kabupaten Nganjuk sebesar 75,24 pada tahun 2024 menempatkannya dalam kategori tinggi (IPM 70–80). Hal ini

menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah memiliki akses yang semakin baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan penghasilan yang layak. Serta, ada peningkatan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu. Peningkatan ini tidak hanya menandakan komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih merata terhadap layanan dasar.



Gambar 1. 3 Persentase Penerima PKH Provinsi Jawa Timur 2022 – 2023

Sumber: (Badan Pusat Statistik 2025)

Gambar 1.3 Persentase Penerima Program Keluarga Harapan Menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk Pada tahun 2023, Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan persentase penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari 23,1% pada tahun 2022 menjadi 24,67%. Meskipun terjadi peningkatan jumlah penerima PKH

Kabupaten Nganjuk , hal ini tidak selalu mencerminkan kemunduran kondisi desa. Sebaliknya, di Desa Jaan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, yang pada tahun 2023 telah berstatus sebagai Desa Maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), keberadaan PKH justru menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan tersebut. Terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, salah satu program yang diluncurkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) (Setyawardani *et al.* 2020). Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin agar mereka dapat hidup layak dan mengembangkan potensi diri.

Pelaksanaan PKH melibatkan peran pendamping yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi serta memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh penerima bantuan. Pendamping juga memastikan bahwa keluarga penerima bantuan menjalankan program dengan baik. Program PKH diharapkan dapat berkontribusi dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan social (Munandar *et al.*, 2019). Menurut Zainab *et al.* (2023) menyatakan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki berbagai keunggulan dalam upaya mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Salah satu keunggulannya adalah pemberian bantuan sosial bersyarat yang tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga mendorong perubahan perilaku positif dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, Program PKH tidak hanya memberikan bantuan tunai kepada anggota PKH, tetapi juga menyediakan

bantuan berupa beras dan makanan sehat yang didistribusikan secara merata. Dengan demikian, PKH dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul ***Analisis Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa (Studi Desa Jaan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk).***

1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang tersebut dapat digunakan untuk merancang suatu masalah penelitian yaitu Bagaimana Peran PKH terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Peran Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Jaan Memiliki manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat mengembangkan konsep terkait pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan dan evaluasi PKH serta sebagai bahan rujukan untuk pengembangan kebijakan di masa mendatang. Manfaat praktis ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi saran dan masukan bagi pemerintah, baik di tingkat desa maupun kabupaten, dalam mengoptimalkan implementasi PKH untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan sosial yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

b Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, terutama penerima manfaat PKH, mengenai peran dan kontribusi mereka dalam mendukung pencapaian SDGs Desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memanfaatkan program sosial demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan.